

### **BAB III**

## **TRAGEDI KEMANUSIAAN DI RAKHINE MYANMAR**

### **A. Negara Myanmar**

#### **1. Geografis Negara Myanmar**

*Republic of the Union of Myanmar* ( Pyihtaungsu Thamada Myanmar Naingngandaw) atau biasa disebut dengan Myanmar adalah negara terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah sekitar 677,578 km<sup>2</sup>. Wilayah negara Myanmar berbatasan dengan 5 negara yakni Bangladesh, India, Laos, Thailand, dan China.<sup>1</sup> Negara ini juga berbatasan dengan China di sebelah utara dan timur laut, Thailand di sebelah tenggara, Laut Andaman dan Teluk Bengal (Bay of Bengal) di barat daya dan selatan, dan India di sebelah barat lautnya.

#### **2. Demografi Negara Myanmar**

Populasi di negara Myanmar termasuk dalam urutan ke 24 yakni berdasarkan sensus penduduk di tahun 2017 negara Myanmar memiliki jumlah penduduk sekitar 55,123,814 jiwa.<sup>2</sup> Myanmar juga memiliki keberagaman etnis, agama, dan sistem pemerintahan yang menjadikan ciri khas dari

---

<sup>1</sup> Husein, N. L., & Fatimah. (2015). Ulama, State, and Politics in Myanmar. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol.53*, hlm. 132.

<sup>2</sup> *The World Factbook: East and Southeast Asia, Burma.* (2018, January 25). Retrieved January 27, 2018, from Library of Central Intelligence Agency: [www.cia.gov](http://www.cia.gov)

negara Myanmar sendiri. Mayoritas masyarakat Myanmar menganut agama Buddha sebanyak 87,9 %, agama Kristen sebanyak 6,2 %, dan agama Islam sebanyak 4,3 %, serta agama lainnya seperti Hindu sebanyak 0,5 %. Bahasa yang digunakan dalam masyarakat Myanmar yakni bahasa Myanmar.

### **3. Sistem Pemerintahan Negara Myanmar**

Myanmar, negara yang merdeka pada 4 Januari 1948 ini sebelumnya dikenal dengan nama Burma. Perubahan nama Burma menjadi Myanmar dilakukan di tahun 1989 yakni pada era pemerintahan militer. Sebelum adanya pemilu di tahun 2016 dimana terpilihnya Presiden yang bukan dari kalangan militer, Myanmar (Burma) dalam sistem pemerintahannya dijalankan oleh seorang pemimpin yang berasal dari kalangan militer. Tujuan dilakukan pergantian nama negara dikarenakan agar etnis non Burma tidak merasa terdiskriminasi dan merasa bahwa mereka juga bagian dari negara itu sendiri. Namun, penggunaan atau penyebutan nama Burma masih digunakan oleh beberapa pihak lain untuk menyebut negara Myanmar seperti negara Inggris dan Irlandia.

Myanmar merupakan negara yang berbentuk kesatuan dan memiliki ibu kota yang berkedudukan di Naypyidaw. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Myanmar ialah berbentuk sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam mengatur pemerintahan negara dipimpin oleh kepala negara yaitu seorang Presiden bernama Htin Kyaw dan dibantu oleh kedua wakil presidennya yakni Myint Swe dan Henry Van Thio. Tidak hanya Presiden dan wakilnya saja, namun dalam menjalankan sistem pemerintahan negara Presiden juga membentuk seorang Konselor Negara Myanmar, yang jabatannya setara dengan Perdana Menteri, yakni Aung San

Suu Kyi untuk membantu menjalankan pemerintahan negara.<sup>3</sup> Pengangkatan dan pembentukan jabatan baru tersebut, yakni Konselor Negara, dibuat dan disetujui oleh Presiden selaku kepala negara Myanmar.

Myanmar dikenal sebagai *Republik of the Union of Myanmar* (Republik Persatuan Myanmar) yang dibagi menjadi beberapa wilayah atau negara bagian didalamnya. Pembagian tersebut terdiri dari 7 wilayah atau region, 7 negara bagian, dan 1 Uni Teritori.

- 1) Pembagian tujuh wilayah di Myanmar terdiri dari :

Tabel 3.1. Pembagian 7 Wilayah Myanmar

<b>No.</b>	<b>Nama Wilayah</b>	<b>Ibu Kota</b>
<b>1.</b>	Ayeyarwady	Pathein
<b>2.</b>	Magway	Magway
<b>3.</b>	Bago	Bago
<b>4.</b>	Sagaing	Sagaing
<b>5.</b>	Tanintharyi	Dawei
<b>6.</b>	Yangon	Yangon
<b>7.</b>	Mandalay	Mandalay

---

<sup>3</sup> Steinberg, D. I., Aung-Thwin, M. A., & Aung, M. H. (2018, January 11). *Myanmar : Facts, Geography, and History*. Retrieved January 30, 2018, from [www.britannica.com](http://www.britannica.com)

- 2) Pembagian tujuh wilayah negara bagian dan satu wilayah Union Territory di Myanmar, dibagi menjadi:

Tabel 3.2. Pembagian 7 Negara Bagian Myanmar

No.	Negara Bagian	Ibu Kota
1.	Chin	Hakha
2.	Kachin	Myitkyina
3.	Kayah	Lolkaw
4.	Kayin	Pa-an
5.	Mon	Mawlamyaing
6.	Rakhine	Sittwe
7.	Shan	Taunggyi
8.	Naypidaw Union Territory	Naypidaw <sup>4</sup>

Selain itu, negara Myanmar adalah negara yang memiliki beragam etnis atau multietnis yang terdiri dari etnis minoritas dan mayoritas. Terdapat 135 etnis di Myanmar, namun hanya yang paling dominan saja yang menempati wilayah Myanmar. Etnis yang ada di Myanmar, yakni :

1. Etnis Bamar atau Birma
2. Etnis Karen
3. Etnis Kayah
4. Etnis Rakhine (Dulu disebut Arakan)
5. Etnis Mon
6. Etnis Kachin
7. Etnis Chin

---

<sup>4</sup> Steinberg, D. I., Aung-Thwin, M. A., & Aung, M. H. (2018, January 11). *Myanmar : Facts, Geography, and History*. Retrieved January 30, 2018, from [www.britannica.com](http://www.britannica.com)

8. Etnis-etnis lainnya seperti etnis Rohingya, etnis Nepal, etnis Indian, dan etnis minoritas lainnya.

Etnis Bamar atau Burman merupakan etnis yang mendominasi di wilayah Myanmar. Terdapat sekitar 68% dari populasi penduduk Myanmar sementara etnis Rakhine, etnis Shan, etnis Karen, dan etnis Mon memiliki populasi sekitar 3-9 % dari keseluruhan penduduk Myanmar.

Banyaknya etnis yang menetap di Myanmar tidak secara langsung dapat diakui sebagai warga negara Myanmar. Terdapat 1 etnis yang memiliki presentase populasi minoritas dari lainnya dan tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar, padahal etnis ini sudah menetap sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaannya, yakni etnis Rohingya. Etnis Rohingya yang telah menetap di wilayah negara bagian Rakhine, dianggap bukan sebagai warga negara Myanmar oleh masyarakat etnis lainnya dan pemerintah Myanmar juga menganggap etnis Rohingya sebagai imigran gelap atau warga Bengal.

## **B. Sejarah Etnis Rakhine dan Etnis Rohingya**

Etnis Rohingya dan etnis Rakhine merupakan dua etnis yang menetap di negara bagian Rakhine. Mayoritas etnis Rohingya menetap di wilayah Rakhine dimana juga terdapat etnis Rakhine yang mendominasi wilayah tersebut. Kedua etnis ini yakni etnis Rohingya dan Rakhine mempunyai hubungan sejarah yang kurang baik. Dimulai dari sejak kedatangan etnis Rohingya pertamakali ke wilayah negara bagian Rakhine.

Dilihat dari ciri-ciri fisik, budaya, dan bahasa, etnis Rohingya lebih mirip dengan etnis Bengali. Ciri-ciri fisik dan budaya etnis Rohingya masuk ke dalam ciri-ciri etnis

keturunan Bengali yakni khususnya sub etnis Chittagoinan. Sementara, bahasa yang digunakan oleh etnis Rohingya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat Indo-Arya. Bahasa yang digunakan etnis Rohingya dikategorikan sebagai bahasa Chittagoinan, dimana dialek bahasa tersebut sering digunakan oleh penduduk yang tinggal di Bangladesh Tenggara.<sup>5</sup> Dari sudut bahasa dan budaya saja, etnis Rohingya lebih masuk kedalam kategori keturunan etnis-etnis di Bangladesh. Itulah alasan masyarakat etnis Rakhine memberikan julukan “Bengal” terhadap etnis Rohingya. Jika ditelusuri dari sejarah kemunculan etnis Rohingya di wilayah Rakhine memang benarasal usulnya adalah dari keturunan masyarakat Bangladesh, namun jika dilihat dari waktu kedatangan dan perkembangan Islam di wilayah Rakhine, etnis Rohingya sudah menetap di wilayah Rakhine bahkan sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaanya.

Diketahui bahwa etnis Rohingya sudah menetap lama di wilayah Rakhine yakni sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaannya. Dilihat dari kedatangan Islam di wilayah Rakhine yakni pada abad ke-13 M. Menurut *Moniqued Skidmore* dan *Trevor Wilson*, persebaran Islam telah mencapai pantai Arakan (Rakhine) sejak 712 H melalui jalur perdagangan. Para pedagang yang berasal dari Persia, Arab, dan Bangladesh selagi mereka melakukan transaksi dalam perdagangan mereka juga sambil menyebarkan pengaruh Islam kepada masyarakat di wilayah Arakan (Rakhine).<sup>6</sup> Selain menyebarkan Islam dan melakukan transaksi dagang, para pedagang arab juga banyak yang menikah dengan penduduk lokal dan memilih untuk tinggal dan menetap di Arakan. Dari terjalin hubungan tersebut, juga mengakibatkan

---

<sup>5</sup> Ikhfal, S. N. (2015). Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, hlm. 39.

<sup>6</sup> Bustaman, R. (2013). Jejak Komunitas Muslim di Burma : Fakta Sejarah yang Terabaikan. *Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan*, hlm. 309-338.

pengaruh Islam meluas di wilayah Rakhine, banyak juga penduduk lokal yang menerima pengaruh tersebut. Populasi masyarakat yang mengadopsi Islam di Arakan semakin bertambah seiring dengan menyebarnya proses dakwah dan kedatangan para pedagang dari wilayah Timur Tengah.

Kemunculan masyarakat muslim yang menjadi cikal bakal lahirnya istilah Rohingya ataupun menyebut dirinya sebagai etnis Rohingya sudah ada sejak zaman Kerajaan Mrauk U yakni pada masa pemerintahan Raja Narameikhla. Di tahun 1404, wilayah Kerajaan Mrauk U yakni Arakan (Rakhine) yang dipimpin oleh Raja Narameikhla ditaklukkan oleh Kerajaan Burma (Myanmar), yang mengakibatkan Raja Narameikhla menyelamatkan dirinya dengan melarikan diri ke wilayah Bengal. Raja Narameikhla diterima kedatangannya oleh Sultan Bengal pada masa itu, yaitu Giyathuddin Azam Shah. Selama menetap di wilayah Bengal, Raja Narameikhla belajar mengenai budaya dan politik Islam yang berdampak pada keinginan kuat Raja Narameikhla untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Shah Solaiman. Pada masa Sultan Bengal Jalauddin Mohammad Shah tahun 1430 M, ia berhasil mengambil alih Kerajaan Arakan dan Raja Narameikhla berhasil menduduki kembali tahta kerajaan.<sup>7</sup> Selama Raja Narameikhla berkuasa kembali, perkembangan Islam di Arakan semakin cepat. Masuknya para penduduk muslim yang berasal dari wilayah Bengal membuat populasi muslim di wilayah Arakan (Rakhine) semakin terus bertambah. Masyarakat muslim yang menetap di wilayah Arakan (Rakhine) menyebut dirinya sebagai Rohingya. Semakin bertambahnya populasi etnis Rohingya di wilayah Arakan (Rakhine) membuat khawatir penduduk lokal yakni etnis Rakhine. Kekhawatiran tersebut juga melahirkan adanya berbagai permasalahan maupun konflik diantara kedua etnis

---

<sup>7</sup> Bustaman, R. (2013). Jejak Komunitas Muslim di Burma : Fakta Sejarah yang Terabaikan. *Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan*, hlm. 326 - 327 .

yang telah menetap di Arakan yakni Etnis Rohingya dan Rakhine.

Istilah Rohingnya sendiri berasal dari kata *Rohai* atau *Roshangee* yang kemudian mengalami penyimpangan menjadi kata Rohingya. Istilah “Rohingya” yang jika diartikan dalam bahasa Arab berarti “rahmat”. Etnis Rohingya merupakan komunitas muslim yang telah lama menetap di wilayah Arakan (Rakhine). Populasi etnis Rohingnya berkembang pesat dibawah pemerintahan Raja Naramaik, namun dibawah pemerintahan Raja Burma muncullah berbagai permasalahan internal seperti tindakan kekerasan terhadap komunitas muslim Rohingya dan kondisi wilayah Arakan yang sebelumnya damai menjadi mencekam.

Di tahun 1842 , datanglah pasukan Inggris yang menduduki wilayah Arakan (Rakhine) dan memiliki tujuan untuk menggabungkan kembali wilayah Arakan dengan negeri Buddha. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai cara dilakukan seperti berusaha memprovokasi komunitas Buddha yang ada di Arakan dan diberikan akomodasi persenjataan oleh Inggris dan menyalurkannya ke masyarakat, khususnya yang mendukung melawan masyarakat etnis Rohingya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penyerangan terhadap komunitas muslim di Arakan pada tahun 1942<sup>8</sup>. Setelah wilayah Burma (Myanmar) merdeka atas lepasnya dari kolonial Inggris pada tahun 1948, komunitas muslim di Arakan (Rakhine) masih tetap ada namun dengan populasi yang tidak sebanyak sebelum wilayah Arakan dijajah oleh Inggris.

---

<sup>8</sup> Joko, T. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. hlm.840-841.



### C. Konflik di Wilayah Negara Bagian Rakhine

Permasalahan antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine memanas kembali pada tahun 2012, berawal dari tragedi pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa salah satu gadis etnis Rakhine. Tepatnya pada tanggal 28 Mei 2012, seorang gadis bernama Ma Thida Htwe (27 tahun) ditemukan tidak bernyawa di hutan bakau yang berdekatan dengan perkampungan komunitas muslim Rohingya. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis Rakhine itu dilakukan oleh tiga orang pemuda yang ternyata berasal dari komunitas muslim Rohingya. Kabar tersebut membuat masyarakat khususnya etnis Rakhine mulai memanas kondisi ataupun memuncak kemarahannya. Dari tragedi itulah, perseteruan antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine memanas kembali. Kemarahan masyarakat khususnya etnis Rakhine tidak cukup disitu saja, beberapa oknum (seperti perkumpulan orang-orang dalam *Wuthanu Rakkhita Association*) memprovokasi atau menjadi provokator masyarakat etnis Rakhine dan juga oknum tersebut menghasut para warga dengan menjelek-jelekkan komunitas muslim Rohingya seperti bahwa mereka adalah sekumpulan pembunuh dan pemerkosa dan telah membunuh dan memperkosa gadis Rakhine dengan keji, masyarakat Rakhine terhasut dan mulai melakukan tindakan pembalasan terhadap komunitas muslim Rohingya yang dianggap sebagai sebuah ancaman.

Berawal dari tragedi pembunuhan gadis Rakhine yang justru memicu tragedi beruntun lainnya. Tepatnya pada tanggal 3 Juni 2012, terjadi tindak kekerasan terhadap beberapa orang etnis Rohingya yang dilakukan oleh sekelompok orang yakni berasal dari etnis Rakhine. Dari kejadian tersebut, memakan 10 korban meninggal yakni 10 muslim Rohingya yang berada di dalam bus dihadang oleh sekelompok orang Rakhine dan serang oleh beberapa orang yang diaki sebagai sekelompok etnis Rakhine, mereka

menyerang tanpa belas kasih dan tanpa mengenal usia maupun gender. Sejak dua insiden pembunuhan terjadi baik terhadap etnis Rakhine maupun etnis Rohingya, kondisi di kawasan Rakhine semakin memanas, khususnya komunitas muslim Rohingya yang sering menjadi sasaran. Masyarakat muslim Rohingya merasa semakin was-was atau merasa tidak aman dalam kondisi lingkungan sekitar, bukannya membuat keadaan semakin damai justru kondisi lingkungan wilayah Rakhine semakin mencekam.

Kondisi tersebut membuat pemerintah Myanmar, yaitu Presiden Thein Sein memberlakukan kondisi darurat terhadap wilayah negara bagian Rakhine. Pada 10 Juni 2012, pemerintah Myanmar memberlakukan status darurat terhadap situasi di negara bagian Rakhine dan mengeluarkan perintah untuk melegalkan intervensi militer (Tatmadaw) demi mengatasi kondisi yang memanas di wilayah Rakhine. Namun, dengan diberlakukannya dan disetujuinya intervensi militer tersebut justru semakin memperburuk keadaan. Kedua etnis yakni etnis Rakhine dan etnis Rohingya saling melakukan serangan balasan.<sup>9</sup>

Setelah memberlakukan intervensi militer yang dianggap “gagal” karena tidak dapat mengatasi kondisi yang memburuk, Presiden Myanmar yakni Presiden Thein Sein menegaskan bahwa komunitas muslim Rohingya adalah orang-orang pelintas batas ilegal dan dianggap oleh pemerintah Myanmar merupakan suatu ancaman bagi keamanan negara Myanmar, maka dari itu Presiden Thein Sein menegaskan sekali lagi bahwa pemerintah Myanmar tidak akan bertanggung jawab serta melindungi orang-orang pelintas batas yakni komunitas muslim Rohingya dan juga pemerintah Myanmar menekankan kepada komunitas muslim tersebut agar segera dipindahkan dan dikirim ke negara-negara ketiga. Ketidakpedulian

---

<sup>9</sup> Ikhsal, S. N. (2015). Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, hlm. 41.

pemerintah Myanmar untuk melindungi para komunitas muslim Rohingya diperjelas lagi dengan ditetapkannya aturan pelarangan terhadap komunitas muslim Rohingya untuk mendapatkan dan memiliki kartu kependudukan atau KTP. Di tahun 2015, Presiden Thein Sein memberlakukan beberapa peraturan bagi komunitas muslim Rohingya yakni pemutusan dan menetapkan tidak berlakunya kartu identitas bagi etnis Rohingya dan ditegaskan sekali lagi bahwa komunitas muslim Rohingya itu adalah orang-orang pelintas batas illegal atau disebut sebagai orang-orang Bengali. Penyebutan “orang Bengali” tidak bukan tanpa alasan tetapi karena jika dilihat dari ciri-ciri fisik dan bahasa, etnis Rohingya lebih masuk kedalam golongan atau lebih kearah keturunan orang-orang Bengal yakni orang-orang yang berasal dari Bangladesh.

Tidak diakuinya komunitas muslim Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar membuat etnis Rohingya mengalami banyak kesulitan. Pertama, kewarganegaraan yang tidak diakui membuat masyarakat etnis Rohingya kesulitan untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, masyarakat Rohingya tidak dapat bahkan kesulitan dalam menikmati fasilitas publik umumnya seperti akses kesehatan, akses pendidikan, akses transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Ketiga, masyarakat Rohingya juga kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti bersosialisasi dengan orang lain atau melakukan kegiatan sehari-hari seperti berbelanja dan membeli kebutuhan sehari-hari, yang diperparah dengan adanya sikap diskriminasi dari masyarakat etnis lainnya terhadap etnis Rohingya, dan yang keempat ialah pandangan orang lain terhadap etnis Rohingya, dimata orang lain dan masyarakat myanmar, masyarakat etnis Rohingya dipandang sebagai orang luar atau asing dan dianggap sebagai orang illegal atau orag-orang pelintas batas illegal yang singgah di wilayah Myanmar, mereka juga memberikan julukan terhadap masyarakat etnis Rohingya yaitu orang Bengali. Masyarakat Myanmar menandang

masyarakat Rohingya sebagai sebuah ancaman bagi keamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat Myanmar.

Di akhir tahun 2017, muncul kembali perseteruan atau konflik di wilayah negara bagian Rakhine, namun untuk kali ini bukan dipicu oleh kejadian beruntun seperti kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap etnis Rakhine tetapi dipicu oleh aksi kegiatan dari terbentuknya ARSA atau Arakan Rohingya Salvation Army. Tepatnya pada 25 Agustus 2017 terjadi konflik antara ARSA dengan militer Myanmar yang dipicu oleh penyerangan ARSA terhadap pos polisi dan menewaskan beberapa petugas. Kejadian tersebut memicu militer Myanmar untuk melakukan operasi pembersihan terhadap pemberontak-pemberontak. Namun tidak hanya para pemberontak saja yang menjadi target dari “ethnic cleansing” tersebut melainkan juga masyarakat sipil khususnya komunitas muslim Rohingya juga menjadi target dalam operasi yang mengatasnamakan operasi pembersihan. Adanya operasi pembersihan memicu gelombang kekerasan lainnya seperti pemerkosaan terhadap wanita-wanita Rohingya, pengeksekusian ditempat, penangkapan paksa, penyiksaan, penjarahan dan pembunuhan hingga pembakaran tempat tinggal. Semakin tidak terkondisinya wilayah negara bagian Rakhine membuat komunitas muslim Rohingya yang masih menetap di wilayah Rakhine memilih untuk menyelamatkan diri ataupun mengungsi ke wilayah yang lebih aman.

Sebenarnya, konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine sudah dimulai semenjak negara Myanmar belum memperoleh kemerdekaannya, namun kondisi tersebut diperparah lagi ketika masa pemerintahan Myanmar dikuasai oleh militer (Junta Militer). Junta militer yang berkuasa di Myanmar mengeluarkan dan menerapkan peraturan-peraturan terhadap etnis-etnis di luar etnis Burma seperti etnis-etnis minoritas yakni etnis Rohingya. Etnis Burma sendiri merupakan etnis terbesar dan memiliki populasi yang mayoritas di Myanmar, etnis Burma ialah etnis yang berasal

dari Sino Tibet dan telah menetap di dataran tengah Myanmar serta memeluk agama Buddha yang berharap dapat dijadikan sebagai agama nasional di Myanmar.<sup>10</sup> Dapat dibbilang, etnis Burma ini ialah etnis yang menguasai sebagian besar pemerintahan dan militer di Myanmar, mereka menjadi etnis yang dominan dan menjadi faktor penentu keberlangsungan negara Myanmar.

Di tahun 1962, Jenderal Ne Win mengambil alih pemerintahan Burma dengan menjalankan kudeta militer terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin oleh U Nu. Sejak saat itu, pemerintahan negara Burma dikuasai oleh junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Jenderal Ne Win adalah merancang “*Constitusi of the Socialist Republic of Myanmar*” dan “*Emergency Immigration Act*”, kedua hal tersebut dijadikan sebagai dasar dari terbentuknya aturan kewarganegaraan berbasis etnis, dan melancarkan operasi militer yang bernama “Operasi Raja Naga” pada tahun 1978, operasi militer ini dilakukan untuk menanggulangi dan meredam gerakan-gerakan separatisme dari sejumlah komunitas etnis Rohingya. Operasi militer tersebut juga mengakibatkan ratusan ribu atau sekitar kurang lebih 200 ribu kaum Rohingya mengungsi ke wilayah negara Bangladesh akibat dari adanya tindak kekerasan seperti pengrusakan, penjarahan, dan pembunuhan yang diterima. Namun di tahun yang sama juga, pemerintah Bangladesh memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan protes serta keberatan atas masuknya komunitas Rohingya ke wilayah negaranya. Melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Negara Myanmar dan negara Bangladesh setuju untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan masalah Rohingya dan menghasilkan keputusan untuk memulangkan Rohingya kembali ke wilayahnya yaitu wilayah negara Myanmar. Berselang

---

<sup>10</sup> Ikhtal, S. N. (2015). Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, hlm.38.

beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1982 pemerintah Bangladesh mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa komunitas Rohingya bukanlah bagian dari warga negaranya. Sementara, untuk menindaklanjuti rancangan tentang peraturan kewarganegaraan, pemerintah akhirnya meresmikan Undang-undang Kewarganegaraan Burma. Dalam Undang-undang (UU) tersebut dipaparkan bahwa terdapat empat kategori warga negara yang terdapat di Burma (Myanmar) yaitu :

1. Warga Negara Penuh atau Utama (*Citizen*)  
adalah masyarakat asli Myanmar atau keturunan asli yang telah lama tinggal dan menetap di Myanmar yakni sebelum tahun 1982 ataupun orang yang orang tuanya adalah warga negara Myanmar.
2. Warga Negara Asosiasi atau Sekunder atau Kelas dua (*Associate Citizen*)  
adalah orang-orang yang mengajukan kewarganegaraan berdasarkan Union Citizenship Act 1948.
3. Warga negara yang dinaturalisasi (*Naturalized Citizen*)  
adalah orang-orang yang tinggal atau menetap di Myanmar sebelum tanggal 4 Januari 1948 namun baru mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah tahun 1982.
4. Orang Asing (*Foreigner*).<sup>11</sup>  
Etnis Rohingya masuk ke dalam kriteria “orang asing”, dimana pemerintah Myanmar menegaskan kepada semua etnis minoritas yang ada dan menetap di wilayah negara Myanmar harus membuktikan bahwa mereka sudah menetap di wilayah tersebut sebelum tahun 1923 atau sebelum perang Anglo-Burma I terjadi.

---

<sup>11</sup> Kipgen, N. (2017). *Tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, Rohingya adalah penduduk tak dianggap*. Retrieved February 02, 2018, from [www.channelnewsasia.com](http://www.channelnewsasia.com)

Berdasarkan dari penjelasan Undang-undang Kewarganegaraan yang telah disahkan oleh pemerintah, menjadikan komunitas muslim Rohingya bukan sebagai warga negara asli Myanmar namun masuk dalam golongan orang-orang asing. Pemerintah menganggap bahwa komunitas etnis Rohingya sebagai para imigran yang masuk ke wilayah Myanmar dan menganggapnya sebagai orang-orang Bengali yaitu orang-orang keturunan Bangladesh. Namun disatu sisi, pemerintah Bangladesh sudah memberikan pernyataan bahwa Rohingya bukanlah bagian dari warga negara Bangladesh.

Kepemimpinan Jenderal Ne Win bertahan selama 26 tahun yakni dari tahun 1962 sampai tahun 1981. Di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win, negara Burma (Myanmar) mengadopsi beberapa sistem pemerintahan baru yang lebih berpaham marxisme dan Buddhisme. Kepemimpinan Jenderal Ne Win yang dianggap diktator dan sistem yang diterapkan terbilang cukup ekstrim dan membuat masyarakat Myanmar tidak merasa puas, yang mana menimbulkan protes yang dimulai dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi yang menuntut agar rezim otoriter Jenderal Ne Win berakhir. Demonstrasi yang terjadi pada 8 Agustus 1988 mengakibatkan era Jenderal Ne Win berakhir dan digantikan oleh Jenderal Maung-Maung. Namun, pemerintahan Jenderal Maung-Maung tidak bertahan lama, pada tanggal 19 September di tahun yang sama terjadi kudeta kedua yang membuat Jenderal Maung-Maung turun dari kepemimpinannya karena dinilai lebih ke demokratis dan mengancam kekuasaan junta militer, akhirnya Jenderal Saw Maung diangkat sebagai pemimpin yang baru.

Pada tahun 1989, di bawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung, sistem pemerintahan Burma mengalami beberapa perubahan besar seperti adanya perubahan nama negara dari “Burma “ menjadi “ Myanmar” dan perubahan nama ibu kota ‘Rangoon’ menjadi “Yangon”. Perubahan nama negara menjadi Myanmar ditujukan agar semua etnis yang non-Burma atau etnis minoritas lainnya merasa dianggap sebagai

bagian dari negara dan untuk menghilangkan rasa tidak adil terhadap etnis-etnis lainnya yang ada di Myanmar. Selain itu, bentuk pemerintahan Myanmar yang masih berbasis militer memiliki istilah nama SLORC atau *State Law and Order Restoration Council*. Setelah menetapkan sistem pemerintahan yang masih mengedepankan junta militer, pada tahun 1990 pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti diskriminasi politik terhadap etnis-etnis minoritas yang ada di Myanmar, etnis Rohingya salah satunya. Etnis Rohingya menjadi sasaran dari diterapkannya diskriminasi politik yang mengakibatkan timbulnya tindak kekerasan, para pekerja yang tanpa upah atau gaji dalam proyek-proyek pemerintah, dan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi. Penerapan diskriminasi politik juga merambah ke arah kebijakan “*Moslem Cleansing*”, dimana sejumlah kelompok memprovokasi dan memobilisasi beberapa komunitas yang memang tidak menyukai keberadaan etnis minoritas muslim Rohingya dengan melakukan beberapa tindakan kekerasan seperti penjarahan, pemerkosaan, pembakaran hidup-hidup, pengrusakan rumah; tempat ibadah; toko; sekolah, dan pengusiran paksa terhadap orang-orang muslim etnis Rohingya. Kepemimpinan Jenderal Saw Maung berakhir ketika di tahun 1991 Jenderal Saw Meung mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala negara dan digantikan oleh Jenderal Than Shwe pada tahun 1992. Rezim junta militer berakhir ketika di tahun 2010 Myanmar menyelenggarakan pemilu yang memilih Thein Sein sebagai Presiden Myanmar.

#### **D. Faktor – Faktor Permasalahan**

##### **1. Faktor Sejarah Kedatangan Rohingya**

Dilihat dari ciri-ciri fisik dan bahasa masyarakat Rohingya lebih masuk ke dalam golongan orang-orang keturunan negara Bangladesh, namun jika dilihat dari



waktu pertama kali komunitas muslim masuk ke wilayah negara Myanmar (dahulu disebut Burma) yakni sudah ada sejak masa kerajaan Raja Naramaikhla pada abad ke-13. Semakin lama populasi orang-orang muslim di Myanmar semakin bertambah dan tersebar di berbagai wilayah di Myanmar.

Dari faktor sejarah dari kedua etnis yakni etnis Rakhine dan etnis Rohingya sama-sama memperdebatkan kekuasaan terdahulu pada saat masa Raja-raja memerintah. Dari pihak etnis Rakhine menyakini bahwa leluhur atau nenek moyang mereka telah menguasai wilayah Arakan (Rakhine) sejak dahulu yang dibuktikan dengan penemuan-penemuan berupa prasasti maupun batu pilar yang menunjukkan bahwa masyarakat etnis Rakhine merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Sementara disisi masyarakat etnis Rohingya, mereka juga mengatakan bahwa kerajaan Myanmar atau pemerintahan Raja Naramaikhla tidak akan kembali menduduki kerajaannya di wilayah Arakan (Rakhine) jika bukan dari bantuan salah satu Sultan Bengal yakni Jalaudin Mohammad Shah, karena jika bukan berkat pertolongan dari Sultan Bengal yang mau menerima kehadirannya saat melarikan diri ke Bangladesh dan membantunya dalam merebut kembali tahta kerajaan maka kepemimpinan Raja Naramaikhla tidak akan dapat kembali menduduki tahta di wilayah Rakhine.

Selain itu, masyarakat etnis Rohingya juga menyatakan bahwa mereka juga merupakan penduduk asli Myanmar karena jika dilihat dari waktu atau masuknya rohingya ke wilayah Arakan serta munculnya peradaban Islam yang dibawa oleh para pedagang dari bangsa Bengali, Persia, serta Arab menunjukkan bahwa komunitas muslim Rohingya sudah sangat lama menetap di wilayah Rakhine yang dulu disebut sebagai Arakan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Alfi. (2013). Causative Factors Rakhine and Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar in 2012. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa UNEJ*, hlm. 07.

Juga, ditemukannya beberapa peninggalan sejarah seperti berkas-berkas atau dokumen yang berbahasa arab dan ilmu-ilmu tentang Islam, batu prasasti yang terukir mengenai komunitas muslim, serta bekas bangunan kerajaan yang membuktikan persebaran Islam di wilayah Myanmar.

## 2. Faktor Geografis

Wilayah Myanmar, pada zaman dahulu disebut sebagai “Tanah Emas”. Istilah tersebut didasari oleh sumber daya alam yang kaya dan melimpah di wilayah tersebut. Myanmar dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam di bidang pertambangan seperti minyak dan gas alam, tembaga, timah, perak, dan mineral selain itu juga memendam berbagai batu-batuan yang bernilai tinggi seperti safir, giok, mutiara, dan zamrud. Kelestarian hutan-hutan yang berada di wilayah Myanmar seperti hutan hujan tropis, dan beberapa hasil alam yang mengandung nilai tinggi seperti kayu merah (padauk), kayu jati, dan rosewood.<sup>13</sup> Khususnya wilayah Rakhine yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti minyak, gas, dan sektor perikananannya. Wilayah tersebut menjadi perebutan antara masyarakat yang menetap diwilayah Rakhine maupun dari pihak luar yang ingin menguasai wilayah tersebut.

---

<sup>13</sup> *Myanmar : Tanah Emas*. (2018). Retrieved February 08, 2018, from Perpustakaan Online: <http://wol.jw.org>

### **3. Faktor Agama**

Setelah kedatangan Islam ke wilayah Myanmar, populasi persebaran agama Islam di wilayah Myanmar semakin luas dan menyebar ke luar wilayah Arakan (Rakhine). Ketakutan dan kekhawatiran komunitas umat Buddha terhadap bahayanya Islam yang memunculkan *Islamophobia*. Munculnya rasa takut tersebut didasari atas banyaknya tragedi atau kasus yang terjadi di beberapa negara yang mencerminkan bentuk radikalisme dan terorisme dari kelompok Islam yang dijadikan sebagai alasan munculnya ketakutan terhadap Islam atau *Islamophobia*. Masyarakat etnis lain memandang bahwa Islam adalah agama para teroris dan memiliki anggapan bahwa semua tragedi serta kejadian yang terjadi dikarenakan aksi-aksi terorisme yang dijalankan oleh orang-orang muslim.

### **4. Faktor Politik (Pemerintahan)**

Junta militer berkuasa atas pemerintahan negara Myanmar di tahun 1962, yang merebut kekuasaan di Myanmar sebelumnya melalui jalan kudeta. Pada saat pemerintahan Jendral Ne Win, memberlakukan beberapa peraturan yang lebih tidak menguntungkan bagi komunitas muslim Rohingya. Kebijakan yang dianggap tidak adil terhadap masyarakat Rohingya masih berlanjut di pemerintahan baru, yakni Presiden Thein Sein. Selepas dari kekuasaan junta militer, negara Myanmar berusaha untuk melahirkan pemerintahan baru yang dipilih atas dasar Pemilu. Justru lahirnya era pemerintahan baru memunculkan tragedi yang baru bagi komunitas muslim Rohingya. Berawal dari tidak diakuinya masyarakat etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar dan tragedi beruntun yang terjadi di wilayah negara bagian

Rakhine yang menjadi lokasi pemukiman bagi sebagian besar masyarakat etnis Rohingya.

## 5. Faktor Militer

Saat pemerintahan Myanmar dikuasai oleh Junta Militer, pemerintah menetapkan dan menerapkan berbagai aturan serta undang-undang yang terbilang otoriter dan memberatkan di satu pihak. Peraturan dan kebijakan yang diterapkan dipandang lebih memberatkan pada komunitas etnis minoritas khususnya etnis minoritas muslim yang menetap di wilayah Myanmar seperti etnis Rohingya. Beberapa aturan dan kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan junta militer yaitu :

- 1) Pemerintah menerapkan politik diskriminasi terhadap etnis-etnis minoritas khususnya etnis muslim Rohingya yang disebut sebagai kebijakan Burmanisasi. Kebijakan ini membuat etnis minoritas muslim yang ada di Myanmar yakni etnis Rohingya yang dipandang sebagai kelompok orang-orang pelintas batas illegal maupun orang-orang Bengali serta tidak diakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Selain itu, diskriminasi politik juga berimbas pada dihilangkannya hak-hak untuk memilih dalam pemilu Myanmar untuk etnis Rohingya.
- 2) Di tahun 1982, pemerintah Myanmar memberlakukan Undang-undang yang baru terkait aturan kewarganegaraan yakni Undang-undang Kewarganegaraan Burma atau *Burmese Citizenship Law* yang menjelaskan 4 kategori dari kewarganegaraan Burma. Khusus untuk etnis minoritas, mereka harus membuktikan bahwa mereka sudah menetap di Myanmar sebelum tahun 1923 atau sebelum perang Anglo-Burma I terjadi, syarat

tersebut dijadikan sebagai acuan untuk dilegalkan dan diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar.

- 3) *Moslem Cleansing* atau pembersihan etnis muslim, Rohingya menjadi salah satu etnis yang ditargetkan. Tindakan yang dilakukan yaitu pemerkosaan, penjarahan, pembakaran hidup-hidup, pengrusakan rumah, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya seperti sekolah, rumah sakit dan jembatan.
- 4) Hak istimewa terhadap beberapa etnis mayoritas di Myanmar, yakni memperbolehkan dan memberikan hak istimewa terhadap etnis mayoritas di beberapa wilayah negara bagian Myanmar untuk mendirikan negara bagian sendiri dan memberikan nama etnis tersebut serta menetapkan nama etnis mayoritas tersebut sebagai nama resmi dari negara bagian yang didirikannya di Myanmar. Seperti negara bagian Rakhine dimana wilayah tersebut di tempati oleh mayoritas etnis Rakhine, walaupun terdapat etnis-etnis lainnya di wilayah tersebut namun etnis Rakhine menjadi etnis yang paling dominan dan memang termasuk kedalam etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar.

Di tahun 1989, diresmikan perubahan nama pada salah satu negara bagian Myanmar Rakhine. Perubahan nama dari Arakan menjadi Rakhine lebih memberikan hak istimewa terhadap etnis Rohingya yang pada masa itu memiliki populasi yang lebih sedikit atau minoritas dibandingkan dengan populasi etnis Rohingya.

## **E. Pihak Terlibat Dalam Konflik Rakhine**

### **1. Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine**

Etnis Rohingya adalah komunitas muslim yang menetap di wilayah negara bagian Rakhine yang dulu disebut sebagai Arakan, sementara etnis rakhine adalah masyarakat yang menetap di wilayah Rakhine yang memiliki populasi lebih banyak dari etnis Rohingya. Kedua etnis ini sering melancarkan aksi-aksi kekerasan yang terkadang dipicu oleh perebutan kekuasaan wilayah, aksi saling memprovokasi, permasalahan sosial baik itu masalah agama; pekerjaan dan diskriminasi politik dari pemerintah Myanmar serta adanya keinginan dari komunitas muslim Rohingya untuk diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar.

Masyarakat etnis Rohingya dan etnis Rakhine menjadi dua pihak penting yang terlibat dalam konflik berkepanjangan yang terjadi di negara bagian Rakhine. Bermula dari 2 tragedi yakni pembunuhan salah satu gadis Rakhine dan terhadap 10 muslim di dalam bus membuat kedua etnis ini saling melakukan aksi saling balas yang berimbas pada memanasnya kembali konflik di wilayah negara bagian Rakhine yang dan berdampak pada bertambahnya jumlah korban baik itu tewas maupun luka-luka serta memunculkan kembali gelombang pengungsi yang mencari tempat aman untuk singgah sementara.

### **2. Junta Militer ataupun Militer Myanmar**

Selama kekuasaan pemerintah dipegang oleh junta militer yakni sejak tahun 1962, banyak peraturan-peraturan yang dibuat atau dikeluarkan dinilai tidak adil khususnya terhadap komunitas muslim yakni etnis Rohingya.

Berawal dari disahkannya undang-undang kewarganegaraan Myanmar namun komunitas muslim Rohingya bukan termasuk sebagai warga negara yang diikuti dengan adanya kebijakan Burmanisasi dan diskriminasi terhadap komunitas muslim Rohingya serta dilancarkannya moslem cleansing yang menargetkan pengusiran komunitas muslim dari wilayah negara Myanmar. Diskriminasi politik yang diterapkan terhadap etnis-etnis minoritas di wilayah negara Myanmar, menimbulkan kejadian beruntun seperti meluasnya pelanggaran HAM khususnya di wilayah etnis-etnis minoritas muslim, tidak diakuiinya Komunitas muslim Rohingya sebagai warga negara yang berdampak pada sulitnya memperoleh pekerjaan serta sulit untuk menggunakan fasilitas publik seperti layanan kesehatan, pendidikan bahkan tidak adanya rasa aman di lingkungan tempat tinggal sendiri.

### **3. Pemerintah Myanmar**

Sejak Myanmar memperoleh kemerdekaannya, pemerintah Myanmar memandang bahwa komunitas muslim Rohingya sebagai orang-orang pelintas batas illegal ataupun orang-orang Bengal. Pemerintah juga menetapkan undang-undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan dan memasukkan komunitas muslim Rohingya justru bukan sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Timbulnya perlakuan diskriminasi terhadap komunitas muslim Rohingya yang berakibat pada munculnya berbagai tindak kekerasan dan aksi-aksi serangan balas dendam yang berujung pada pecahnya kembali konflik di Myanmar khususnya wilayah negara bagian Rakhine.

Sikap dari pemerintah Myanmar sendiri dinilai acuh terhadap kondisi yang dialami oleh komunitas muslim Rohingya. Tidak adanya tindakan pencegahan dan

penanganan yang jelas dari pemerintah Myanmar untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di wilayah negara bagian Rakhine. Penasehat negara Myanmar yakni Aung San Suu Kyi yang dikenal sebagai penerima nobel perdamaian justru tidak melakukan tindakan yang tegas dalam menangani konflik berkepanjangan serta tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine, yang mana dari sikap yang ditunjukkan membuat peraih nobel perdamaian tersebut dikecam oleh masyarakat dunia internasional.

#### **4. Komunitas Buddha Garis Keras**

Mayoritas masyarakat Myanmar memeluk agama Buddha, dan agama tersebut dijadikan sebagai agama nasional. Masyarakat pemeluk agama Buddha merasa khawatir dan takut akan berkembangnya Islam di wilayah Myanmar, Islamophobia dijadikan sebagai alasan untuk menentang dan melawan komunitas muslim di Myanmar. Komunitas umat Buddha Rakhine juga merupakan masyarakat yang mudah dan rentan diprovokasi untuk melakukan sejumlah tindakan terhadap kelompok lainnya. Ma Ba Tha misalnya, kelompok kaum nasionalis Buddha garis keras yang dipimpin oleh seorang biksu Buddha bernama Ashin Wiranthu. Kelompok ini memanfaatkan serangan ARSA atau tentara penyelamat Rohingya pada Agustus 2017 lalu sebagai alasan untuk membentuk citra negatif terhadap komunitas muslim Rohingya.

Biksu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam komunitas umat Buddha, namun kedudukan dan kehormatan tersebut sering disalahgunakan oleh oknum atau pihak-pihak yang memang ingin memecah belah suatu keadaan damai. Sejumlah para biksu yang menentang dan menganggap bahwa keberadaan komunitas muslim Rohingya di Myanmar adalah suatu ancaman dengan gencar memprovokasi masyarakat lainnya dan



menyebarkan kebencian terhadap komunitas muslim Rohingya. Pengaruh para biksu juga menyebar masuk kedalam sistem pemerintahan Myanmar dan semakin mempengaruhi jalannya pemerintahan.

## **5. ARSA atau Arakan Rohingya Salvation Army**

ARSA atau tentara penyelamat Rohingya yang sebelumnya dikenal dengan nama Harakah al-Yaqin atau gerakan iman, kelompok ini adalah sekumpulan orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai kelompok yang membela kaum Rohingya yang tertindas dan memiliki tujuan untuk melindungi serta menyelamatkan kaum muslim yang berada di wilayah negara bagian Rakhine. Kelompok yang diketuai oleh seorang pemuda bernama Ata Ullah ini dijuluki oleh pemerintah Myanmar sebagai kelompok pemberontak dan juga sebagai kelompok teroris yang harus dibasmi keberadaannya. Diketahui ARSA, pada pertengahan Agustus 2017, melancarkan aksinya yakni menyerang pos polisi Myanmar dan menewaskan beberapa petugas yang memicu aksi pembalasan dari militer Myanmar melalui operasi pembersihan etnis atau ethnic cleansing yang berakibat pada ratusan ribu masyarakat Rohingya mengungsi untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar.

## **F. Dampak Tragedi Kemanusiaan Di Rakhine**

Konflik berkepanjangan yang menimpa komunitas muslim Rohingya menyisakan duka dan kerugian yang cukup besar mulai dari kehilangan sanak saudara dan tempat tinggal hingga luka-luka baik itu fisik maupun psikis yang diterima oleh komunitas muslim Rohingya. Di tahun 2012 terdapat sekitar 1,1 juta warga Rohingya yang menjadi korban dari

adanya kekerasan dan konflik di wilayah negara bagian Rakhine. Dari data yang dikumpulkan oleh badan PBB dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni Human Right Watch (HRW), diketahui bahwa korban tewas atau meninggal dunia mencapai 400 jiwa, namun 69 % dikarenakan tewas ditembak dan yang lainnya akibat dari dibunuh yakni dipukuli sampai tewas ataupun dibakar hidup-hidup.

Dari 1,1 juta warga Rohingya, 2/3 nya memilih untuk meninggalkan wilayah Rakhine ataupun mengungsi ke wilayah lainnya yang dianggap lebih aman. Terdapat 700 ribu orang yang memilih untuk mengungsi ke wilayah ataupun negara yang mau membantu dan menampung mereka. Para pengungsi memilih untuk pergi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Bangladesh menjadi tujuan utama para pengungsi yaitu komunitas muslim etnis Rohingya dikarenakan negara tersebut menjadi tempat terdekat untuk mencari tempat perlindungan. Pada bulan September 2012, terdapat sekitar lebih dari 647 ribu warga Rohingya menuju ke wilayah perbatasan Bangladesh dengan Myanmar, namun pemerintah Bangladesh tidak mampu untuk menampung semua pengungsi yang melarikan diri ataupun menyelamatkan diri ke wilayah Bangladesh. Hanya sekitar 300 sampai 500 ribu yang dapat ditampung di kamp-kamp penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah Bangladesh. Tidak hanya negara Bangladesh saja yang dijadikan tujuan, Malaysia dan India juga dijadikan sebagai tujuan pelarian komunitas muslim Rohingya untuk mendapatkan perlindungan dan tempat menetap sementara. Berdasarkan dari data UNHCR, Bangladesh menjadi tepat sebagai kamp penampungan dengan jumlah yang paling banyak dan Malaysia hanya menerima sekitar 60 ribu masyarakat Rohingya, sementara India menjadi tempat dengan jumlah pengungsi yang sedikit.

Namun 1,1 juta orang bukanlah jumlah keseluruhan dari komunitas muslim Rohingya yang berada di Myanmar. Terdapat sekelompok masyarakat Rohingya yang masih lebih

memilih untuk menetap dan tinggal di wilayahnya. Namun, akibat dari adanya konflik tersebut pasokan makanan dan pelengkap kebutuhan hidup lainnya menjadi terlalu sulit untuk didapatkan. Mulai muncul berbagai penyakit dan kesulitan menerima perawatan kesehatan ataupun layanan medis yang menimpa masyarakat Rohingya yang masih saja bertahan di wilayah konflik. Sedikitnya 120 ribu orang mengalami kelaparan dan gizi buruk dikarenakan tersendatnya akses makanan dan bantuan dari luar. Data dari UNICEF sendiri memperkirakan bahwa anak-anak usia 5 tahun dan balita yang paling banyak menjadi korban, dan juga sekitar 150 anak menjadi korban tewas yang jika dihitug setiap harinya diperkirakan mencapai presentase sekitar 30% nya diakibatkan oleh gizi buruk.

Di tahun 2017, muncul kembali ketegangan antara ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) dan militer Myanmar yang memicu serangkaian tragedi kekerasan di wilayah negara bagian Rakhine. Berawal dari serangan ARSA terhadap pos polisi militer yang menewaskan beberapa petugas membuat militer Myanmar melakukan operasi pembersihan terhadap para pemberontak-pemberontak. Mengatasnamakan operasi pembersihan untuk mengatasi para pemberontak namun justru dapat dibilang sebagai operasi ethnic cleansing, masyarakat Rohingya yang masih menetap di wilayah negara bagian Rakhine juga menjadi korban. Dari data yang didapatkan oleh PBB pada bulan Mei, terdapat sekitar 120 ribu masyarakat Rohingya yang memilih untuk meninggalkan wilayah Rakhine ataupun mengungsi ke wilayah negara tetangga yaitu Bangladesh. Namun, karena kondisi kamp-kamp yang berada di wilayah negara Bangladesh sudah tidak layak, maka hanya dapat menerima dan menampung sekitar 26 ribu para pengungsi. Masyarakat Rohingya juga memilih jalur atau tempat lain untuk mencari tempat perlindungan dimana mereka juga rela untuk menyebrangi lautan perbatasan antar negara dan dengan tujuan ke wilayah-wilayah negara seperti Malaysia dan Indonesia. Pada akhir Agustus, lebih dari

setengah juta masyarakat Rohingya yakni sekitar 688 ribu orang mengungsi ke wilayah negara tetangga Bangladesh untuk menghindari tindak kekerasan dari militer Myanmar. Namun, sayangnya pemerintah Bangladesh sudah tidak mau menerima para pengungsi Rohingya. Dari data yang diperoleh PBB, terdapat sekitar 20.000 masyarakat Rohingya yang tertahan di sepanjang perbatasan menuju Bangladesh dan juga ditemukannya kuburan massal yang terletak di wilayah perbatasan Malaysia.<sup>14</sup> Komunitas muslim Rohingya yang tidak memiliki status kewarganegaraan dan tidak memiliki tujuan yang membuat mereka terombang-ambing di tengah lautan tanpa arah.

Komunitas muslim Rohingya tidak hanya dihantui oleh rasa takut dan ketidakjelasan nasib mereka, namun juga mereka tidak dapat kembali ke rumah ataupun kampung halaman mereka di Myanmar. Pada akhir tahun 2017, pemerintah Myanmar mengeluarkan perintah serta memberikan arahan untuk membumihanguskan wilayah pemukiman yang ditinggali atau ditempati oleh komunitas muslim Rohingya. Sedikitnya terdapat 55 desa yang dibumihanguskan dan diratakan oleh mesin atau alat berat atas perintah dari pemerintah Myanmar. Sejak Agustus, selama operasi pembersihan atau ethnic cleansing yang dilancarkan oleh militer Myanmar telah tercatat sebanyak 362 desa di Myanmar yang didiami oleh komunitas muslim dibumi hanguskan dan diratakan.

Pemerintah Myanmar juga telah melakukan tindakan pembersihan lahan yang telah menjadi wilayah pemukiman masyarakat etnis Rohingya. Dari penuturan salah satu perwakilan Human Right Watch yakni Richard Weir mengatakan bahwa tanah yang menjadi lahan pemukiman etnis Rohingya telah disapu bersih dan dihilangkan dari muka

---

<sup>14</sup> *Rohingya Crisis*. (2018). Retrieved February 10, 2018, from Human Rights Watch: [www.hrw.org](http://www.hrw.org)

bumi, tidak ada bekas apapun seperti bekas jalan, pertanian, dan tidak ada penunjuk apapun bahwa itu dulunya adalah tempat pemukiman masyarakat etnis Rohingya.

Gambar wilayah pemukiman etnis Rohingya di Myanmar :

Gambar Pertama



Gambar 4.1. Wilayah Myin Hult Sebelum Pembersihan

Gambar Kedua



Gambar 4.2. Wilayah Myin Hult Sesudah Pembersihan

Jika dilihat dari dua gambar yang berasal dari pantauan satelit, terlihat jelas perbedaanya. Berdasarkan 2 gambar yang diatas yang dimana pada gambar pertama terlihat jelas wilayah yang menjadi tempat pemukiman masyarakat etnis Rohingya yakni wiayah Myin Hult masih nampak ada, masih terlihat rumah-rumah berdiri dan pepohonan serta lahan pertanian warga masih terlihat. Namun pada gambar kedua yang masih menunjukkan tempat yang sama namun didalam gambar kedua terlihat kosong dan bersihnya wilayah yang dulunya terdapat rumah, pepohonan, dan lahan pertanian, tidak ada tanda-tanda pernah dihuni di wilayah tersebut karena semua rata dengan tanah. Dalam kurun waktu 2 bulan, yakni dari Desember 2017 sampai Februari 2018 wilayah tersebut telah bersih dari bangunan ataupun pertanian apapun dan berubah menjadi wilayah yang rata dengan tanah, serta tidak meninggalkan bukti sedikitpun bahwa dulu di wilayah tersebut pernah dihuni masyarakat etnis Rohingya.<sup>15</sup>Tampaknya, pemerintah Myanmar telah mengambil langkah yang baru untuk menegaskan bahwa masyarakat etnis Rohingya bukan bagian dari warga negara Myanmar.

---

<sup>15</sup> *Burma : Sores of Rohingya Villages Bulldozed.* (2018). Retrieved February 10, 2018, from Human Rights Watch: [www.hrw.org](http://www.hrw.org)